

Nderek Kiai: Santri dalam Ideologi Politik Indonesia 2024

Nderek Kiai: Santri in the 2024 Indonesian Political Ideology

Fatikhatur Rizqya^{a,1*}, Nadya Afdholy^{b,2}

^{ab}Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga
Jl. Airlangga 4-6 Gubeng, Surabaya, Indonesia

fatikhatur.rizqya-2023@fib.unair.ac.id, nadyaafdholly@fib.unair.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 20 Juni 2024

Direvisi: 10 Oktober 2024

Disetujui: 29 Oktober 2024

Keywords

nderek kiai
political election 2024
critical discourse analysis
ideology

Kata Kunci

nderek kiai
pemilu 2024
analisis wacana kritis
ideologi

ABSTRAK

Abstract

This research aims to examine the use of the phrase "nderek Kiai" as a discourse to legitimize power and steer the santri (muslim student) in order to win a political candidate pair in the 2024 election. By using a critical discourse analysis and Terry Eagleton's theory of ideology, this research analysed mass media news about the declaration of support from Gus Mudhlor, Regent of Sidoarjo. The results show that the phrase "nderek Kiai" serves a significant ideological purpose to build political legitimacy by linking political support to the kiai's religious authority. It creates a powerful narrative that resonates with the santri community, steers them as part of a particular political movement, and drives support for a desired candidate. This research reveals the strategic role of religious phrases in winning electoral political contests in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan frasa *nderek Kiai* sebagai wacana untuk melegitimasi kekuasaan dan mengarahkan santri guna memenangkan pasangan calon politik dalam pemilu 2024. Dengan menggunakan analisis wacana kritis dan teori ideologi Terry Eagleton, penelitian ini menganalisis berita media massa tentang deklarasi dukungan Gus Mudhlor, Bupati Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa *nderek Kiai* memiliki tujuan ideologis yang signifikan, yakni digunakan untuk membangun legitimasi politik dengan menghubungkan dukungan politik dengan otoritas religius kiai. Itu menciptakan narasi kuat yang beresonansi dengan komunitas santri, mengarahkan mereka sebagai bagian dari gerakan politik tertentu, dan mendorong dukungan untuk pasangan calon yang diinginkan. Penelitian ini mengungkap peran strategis frasa religius dalam memenangi kontes politik elektoral di Indonesia.

1. Pendahuluan

Kontestasi pemilu selalu menjadi momentum penting dalam sejarah politik bernegara dan Indonesia baru saja merayakan *valentine* demokrasinya yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Ajang tersebut bukan hanya milik para aktor politik yang berkompetisi untuk memperebutkan kursi kekuasaan melalui pemilihan umum, tetapi peran dan kontribusi banyak pihak, termasuk seluruh rakyat, juga

mewarnai dinamika politik elektoral di Indonesia. Politik, baik dalam konteks global maupun nasional, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh otoritas agama. Agama senantiasa memainkan peran yang krusial dalam proses elektoral. Relasi antara politik, agama, serta kekuasaan merupakan fenomena kompleks serta dinamis, bahwa agama dapat berperan sebagai alat legitimasi, sumber identitas kolektif, serta instrumen mobilisasi massa. Pengaruh agama pada politik elektoral di Indonesia tecermin dalam sejarah politik serta dinamika interaksi antara agama dan kekuasaan dalam konteks pemilu di Indonesia selama ini.

Sejarah politik Indonesia ditandai oleh perubahan signifikan dari era kolonial hingga era reformasi. Setelah memperjuangkan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami berbagai fase politik, mulai dari demokrasi parlementer pada tahun 1950-an, pemerintahan otoriter di bawah Orde Lama, hingga Orde Baru yang berakhir pada tahun 1998. Selanjutnya, ada era reformasi yang dimulai setelah jatuhnya Suharto, perlahan membuka jalan bagi demokratisasi serta kebebasan politik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih bebas dan adil (Aspinall & Mietzner, 2010).

Selama masa kepemimpinan Soeharto dalam Orde Baru, politik Indonesia dikendalikan oleh dominasi kekuatan militer dengan hanya menyisakan sedikit ruang bagi partisipasi politik yang bebas. Namun, pada saat itu agama tetap memainkan peran krusial sebagai kekuatan moral dan sosial di tengah masyarakat. Pemerintahan Soeharto menggunakan pengaruh agama, terutama Islam, sebagai alat untuk memperkuat legitimasi politiknya meskipun pada saat yang sama melakukan kontrol ketat terhadap aktivitas politik berbasis agama (Fealy & White, 2008). Setelah Orde Baru berlalu, muncul partai-partai politik berbasis agama untuk berkompetisi dalam pemilu. Hal itu mencerminkan kebebasan politik yang baru ditemukan pada era reformasi.

Dalam konteks politik elektoral atau pemilu, agama sering kali menjadi faktor penentu dalam menarik dukungan pemilih. Pemilu 2019, misalnya, menunjukkan bagaimana politik identitas dan agama memainkan peran penting dalam kampanye. Para kandidat sering kali ditampilkan terlibat dalam acara keagamaan dan mengunjungi ulama serta lembaga keagamaan untuk memperoleh dukungan. Isu-isu yang terkait dengan agama juga cukup sering dimanfaatkan sebagai alat atau media untuk membangun citra positif atau bahkan menyerang lawan politik. Fenomena itu menunjukkan bahwa agama bukan hanya elemen budaya, tetapi juga alat strategis dalam politik elektoral (Mujani et al., 2018).

Pemanfaatan agama dalam politik elektoral dapat ditinjau sebagai bentuk dari apa yang disebut Terry Eagleton sebagai ideologi, yakni sistem nilai dan keyakinan yang membantu melegitimasi kekuasaan politik tertentu (Eagleton, 1991). Dalam konteks yang lebih spesifik, agama di Indonesia menyediakan kerangka nilai yang kuat dan memiliki pengaruh besar terhadap identitas dan loyalitas pemilih. Dengan memanfaatkan simbol-simbol agama, aktor politik berusaha melegitimasi kekuasaan mereka dan memperoleh dukungan yang luas. Hal itu dapat dilihat melalui cara kampanye politik yang kerap kali menggabungkan retorika religius dengan janji-janji politik serta menciptakan narasi yang kuat dan beresonansi dengan masyarakat.

Selain itu, dalam politik, agama juga memiliki peran sebagai alat mobilisasi massa yang efektif. Keterlibatan tokoh agama dalam kampanye politik dapat menarik dukungan dari komunitas agama yang mereka pimpin. Misalnya, dukungan dari ulama terkemuka dapat dengan mudah memengaruhi preferensi pemilih dalam

sebuah komunitas muslim yang besar. Hal itu membuat pemimpin agama memiliki kekuatan politik yang signifikan bahwa mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual; pihak yang memiliki otoritas dalam lembaga keagamaan, tetapi lebih dari itu, mereka juga berperan sebagai aktor politik yang berpengaruh (Pepinsky et al., 2012).

Di Indonesia peran agama dalam politik elektoral juga terlihat dalam pembentukan koalisi politik. Partai-partai politik kerap membentuk aliansi dengan organisasi keagamaan untuk memperkuat basis dukungan mereka. Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berbasis Islam berkoalisi dengan partai lain untuk memperluas jangkauan politik mereka. Koalisi semacam itu adalah bukti bahwa agama dapat menjadi sumber daya politik yang krusial dalam mencapai kemenangan elektoral (Ufen, 2018). Peran agama dalam kontestasi politik Indonesia dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan; cenderung konsisten, bahkan mengalami perkembangan yang pesat dalam hal cara pengaktualisasian peran tersebut. Dalam pemilu 2024, misalnya, isu politik identitas sangat kuat tercium dari para kandidat capres-cawapres. Bahkan, Muhaimin Iskandar, calon Wakil Presiden nomor urut 01 terafiliasi dengan salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, NU. Sebagaimana yang diungkap oleh Eagleton, agama sebagai ideologi adalah alat yang dapat melegitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, tentu afiliasi tersebut adalah kendaraan yang nyaman untuk melenggang dalam kontestasi politik, tetapi di saat yang sama hal itu juga dapat menjadi bumerang, alat bagi lawan politik untuk menyerang dan memenangi kontestasi politik tersebut.

Menjelang pelaksanaan pemilu 2024, pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden gencar melakukan kampanye, baik langsung maupun tidak langsung, dihadiri oleh pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Seperti halnya yang terjadi di Sidoarjo, menjelang pelaksanaan pemilu 2024, Bupati Sidoarjo, Ahmad Mudhlor Ali, atau Gus Mudhlor, memimpin deklarasi dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Prabowo Gibran di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo dengan menyampaikan pidatonya. Salah satu yang menarik dari pidato Gus Mudhlor tersebut adalah penggunaan frasa */Nderek Kiai pilih Prabowo Gibran/*. Pemilihan frasa */nderek Kiai/* untuk tujuan politis menjadi menarik untuk diteliti karena frasa, sebagai bagian dari bahasa, memiliki makna yang sangat terikat dengan konteksnya.

Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi. Terlebih dalam wacana politik, bahasa digunakan secara strategis untuk membentuk cara berpikir masyarakat, mengarahkan opini publik dan menciptakan relasi kekuasaan tertentu (Fairclough, 2013). Hal itu menunjukkan adanya relasi yang erat antara bahasa dan ideologi sehingga pemilihan frasa tertentu dalam konteks politik pasti memiliki tujuan di baliknya. Untuk memahami bagaimana penggunaan bahasa dalam konteks politik, khususnya untuk melanggengkan atau menantang ideologi yang berkuasa, penting untuk melihat fenomena tersebut melalui kacamata kajian wacana kritis.

Jika ditinjau dari sudut pandang kajian wacana kritis, bahasa berfungsi sebagai teks dan tidak dapat berdiri sendiri selain ditinjau pula dari konteks dan co-tekstanya. Dukungan itu adalah bentuk adanya relasi antara politik dengan otoritas agama, dalam hal ini pesantren dan kiai, sebagai pihak yang berwenang dalam institusi keagamaan dan bagaimana hal tersebut berperan dalam praktik politik elektoral. Fenomena tersebut juga menampilkan konsep ideologi yang menjadi buah pemikiran

Terry Eagleton, yang dalam hal ini terkandung dalam nilai keagamaan, yang digunakan sebagai alat untuk berkontestasi politik.

Kajian terkait dengan relasi agama dan politik, khususnya dengan melihat peran pesantren sebagai institusi keagamaan dan juga kiai sebagai figur dengan otoritas penuh dalam lingkungan pesantren, sudah pernah dilakukan oleh Rezqi Husnan Akbari pada 2020 berjudul *Urip Mati Nderek Kiai: Kajian Voting Behavior Santri Institusi Pendidikan Islam SMA Syubbanul Wathon Magelang dalam Pemilu Presiden 2019*. Sebagaimana tertera pada judul, penelitian tersebut mengeksplorasi perilaku pemilih (*voting behaviour*) santri di SMA Syubbanul Wathon, Magelang, dalam Pemilu 2019. Tujuan penelitian tersebut untuk memahami pengaruh kiai terhadap perilaku pemilih santri dalam pemilu sekaligus menjelaskan hubungan antara otoritas religius kiai dan keputusan politik santri serta bagaimana ajaran agama serta nilai-nilai yang diajarkan di pesantren sebagai institusi pendidikan Islam memengaruhi preferensi pemilih.

Untuk konteks yang lebih spesifik, yakni Jawa Timur, terdapat penelitian sebelumnya yang mengkaji dinamika gerakan politik Islam, khususnya dalam lingkup pesantren dalam konteks pemilu Indonesia 2024. Penelitian tersebut berjudul *Dynamics of The Islamic Political Movement: The Influence of Pesantren's Islamic Community in East Java in the 2024 Elections* yang dilakukan oleh Pramuja Yudha Pratama, Muhammad Badri Habibi, dan Ratih Kusuma Ningtias (2024). Penelitian tersebut mengkaji peran aktif komunitas pesantren dalam membentuk dan mempengaruhi opini politik komunitas Islam di Jawa Timur.

Nilai kebaruan pada penelitian ini terletak pada konteks geografis. Penelitian selanjutnya akan berfokus pada dinamika sosial dan politik di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kabupaten Sidoarjo. Selain konteks geografis, fokus penelitian juga beralih pada subjek yang merupakan seorang bupati serta interaksinya dengan santri serta masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana wacana *nderek* Kiai yang disampaikan oleh Gus Mudhlor dalam pidatonya di acara deklarasi dukungan tersebut digunakan dalam struktur kampanye politik untuk melegitimasi kekuasaan serta mencari dukungan pemilih.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana kekuasaan dan legitimasi dibangun serta dipertahankan melalui agama, khususnya dengan memanfaatkan institusi agama dan figur dengan otoritas penuh dalam institusi tersebut dalam politik elektoral. Hal yang selama ini tampak jelas, tetapi cenderung di kesampingkan karena dianggap sebagai hal yang lumrah. Peran agama dalam masyarakat Indonesia yang sangat penting memungkinkan agama menjadi topeng dari nilai-nilai atau ideologi tertentu yang berusaha untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Hal itu secara tidak langsung dapat mematikan kesadaran masyarakat untuk bersikap kritis terhadap nilai-nilai yang selama ini melekat di bawah alam sadar; menghegemoni. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang relasi antara agama dan politik serta dapat meningkatkan kontribusi untuk mengevaluasi proses demokrasi dan strategi politik yang selama ini berlangsung di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna serta tujuan ideologis di balik penggunaan wacana dan memahami konteks sosial politik yang memengaruhi wacana tersebut. Metode kualitatif tepat digunakan untuk menganalisis fenomena yang kompleks dan dinamis seperti yang memerlukan pemahaman mendalam tentang interaksi antara aktor politik dan simbol-simbol religius. (Creswell & Creswell, 2018). Fokus penelitian ini adalah analisis wacana kritis terhadap narasi yang disampaikan kepada publik melalui teks berita di media massa daring (*online*) yang memuat deklarasi yang digunakan oleh berbagai pihak, dalam hal ini figur otoritatif, Bupati Kabupaten Sidoarjo, untuk memenangi dukungan terhadap calon pasangan yang diinginkan. Dalam kajian analisis wacana kritis, teks berita tidak semata-mata dianalisis sebagai bagian dari bahasa atau alat menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mengungkap kekuatan ideologis serta kekuasaan di balik penggunaan bahasa itu sendiri (Afdholy et al., 2022).

Pemilihan berita media massa daring sebagai sumber data didasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni relevansi, aksesibilitas, serta kontekstualisasi. Relevansi berarti peran media massa sebagai saluran utama untuk menyebarkan serta membingkai wacana politik pada publik. Aksesibilitas mencakup keterbukaan akses media tersebut pada publik sehingga dapat menjadi sumber data yang tepat untuk menganalisis bagaimana wacana tersebut dipresentasikan serta diterima oleh publik. Selain itu, berita juga dapat memberikan konteks historis dan situasional yang relevan dengan peristiwa politik sehingga tetap kontekstual. Sampel dalam penelitian ini adalah sebuah teks berita dari surat kabar daring berjudul “Gus Mudhlor: Nderek Kiai Pilih Pak Prabowo!” yang terbit pada 1 Februari 2024 dari sumber *detikJatim* yang dapat diakses melalui laman <https://www.detik.com/jatim>. Selain berita tersebut, terdapat sampel berita kedua berjudul “Gus Muhdlor: Nderek Kiai, Milihnya Prabowo” terbitan *Harian Disway* (<https://harian.disway.id/>) pada 1 Februari 2024. Kedua sampel tersebut merupakan sumber data utama atau primer dalam penelitian ini. Sebagai tambahan, penelitian ini juga didukung oleh sumber data sekunder seperti laman (*website*), jurnal, prosiding, dan buku elektronik yang relevan terhadap topik penelitian ini.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam hal ini berupa seperangkat laptop dengan koneksi jaringan internet yang digunakan untuk menghimpun data primer dari laman resmi surat kabar daring *detikJatim* dan *Harian Disway* serta beberapa data pendukung yang juga dihimpun secara daring. Selain itu, perangkat lunak MS Word dan beberapa lainnya juga digunakan demi kelancaran penelitian. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan jaringan internet untuk mencari data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya, data-data tersebut diseleksi, diunduh, lalu disalin ke perangkat lunak MS Word. Analisis dan interpretasi memanfaatkan teori ideologi dan kekuasaan untuk memahami implikasi politis dari penggunaan wacana “*nderek Kiai*”. Setelah terkumpul, data selanjutnya dianalisis menggunakan analisis wacana kritis untuk mengungkap ideologi tersembunyi dalam diskursus (*discourse*) tersebut (Fairclough, 2013). Konsep pemikiran yang menjadi rujukan dari analisis ini adalah pemikiran Terry Eagleton terkait ideologi dan interpelasi. Ideologi memahami bagaimana wacana “*nderek kiai*” berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan politik, sementara interpelasi menjelaskan bagaimana

individu dipanggil menjadi subjek tertentu melalui penggunaan bahasa serta simbol religius (Eagleton, 1991).

3. Hasil dan Pembahasan

Kesuksesan politik elektoral di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari banyak faktor lain yang memegang peran penting untuk merebut dukungan masyarakat dan memenangkan salah satu kandidatnya. Salah satu faktor tersebut adalah agama. Hal itu dilakukan karena Indonesia merupakan negara dengan populasi mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data tahun 2023, populasi penduduk beragama Islam di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa atau setara dengan 86,7 persen dari populasi nasional secara keseluruhan (Annur, 2023). Angka tersebut menunjukkan dominasi masyarakat Islam sebagai salah satu faktor kuat yang memengaruhi peran dan posisi Islam sebagai agama yang paling banyak dianut di Indonesia dan berdampak besar pada berbagai aspek termasuk sosial dan politik dalam masyarakat Indonesia (Ni'mah & Rifa'i, 2022).

Populasi masyarakat penganut agama Islam tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur dengan populasi total 31.402.838 penduduk (Pinterpolitik, 2023). Hal itu merupakan faktor yang menempatkan Jawa Timur sebagai wilayah yang berperan besar dalam menentukan arah dan dinamika politik nasional (Pratama et al., 2024) sehingga bukanlah sesuatu yang aneh jika Jawa Timur akhirnya menjadi sasaran empuk bagi para elite politik untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya sebagaimana dukungan kepada pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang kuat digaungkan dari berbagai penjuru Jawa Timur. Di Sidoarjo dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut dilakukan di Pondok Pesantren Bumi Sholawat, dengan dipimpin oleh Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor selaku Bupati Sidoarjo. Deklarasi diliput oleh beberapa media massa seperti *detik.com* dan *Harian Disway* sebagaimana berikut.

Berita 1: “Gus Muhdlor: Nderek Kiai Pilih Pak Prabowo!”

Gus Muhdlor: Nderek Kiai Pilih Pak Prabowo!
Suparno - detikJatim
Kamis, 01 Feb 2024 19:37 WIB



Gus Muhdlor mengacungkan 2 jari di acara deklarasi dukungan untuk Prabowo-Gibran. (Foto: Aprilia Devi/detikJatim)

Sidoarjo - Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor muncul di acara deklarasi dukungan Paslon 02 Prabowo-Gibran di Ponpes Bumi Sholawat. Di acara itu, Bupati Sidoarjo yang maju dengan kendaraan PKB itu mengajak warga pilih

Prabowo. Acara selawatan sekaligus deklarasi dukungan untuk Prabowo-Gibran itu digelar Pemimpin Pondok Pesantren Bumi Shalawat KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali, ayah Gus Muhdlor. Di tengah rintik hujan, di antara ribuan massa santri dan masyarakat umum yang memakai kaus putih bertuliskan 'Prabowo-Gibran Gemoy, Nderek Abah Kiai Ali' itulah Gus Muhdlor berorasi. Dalam orasi itu dia mengajak seluruh warga dan santri Sidoarjo yang hadir dalam kegiatan itu mengikuti sang kiai, yang tak lain adalah ayahnya sendiri, pilih Prabowo di Pilpres 2024. Dia sampaikan juga alasan kenapa harus Prabowo? Di hadapan masyarakat dia sampaikan bahwa yang layak melanjutkan pembangunan di Indonesia karena menjadi representasi Jokowi adalah paslon 02 Prabowo-Gibran. "Yang bisa melanjutkan, yang merepresentasikan, yang menggambarkan Jokowi hari ini Pak Prabowo," kata Gus Muhdlor dalam orasinya, Kamis (1/2/2024). Kemunculannya di acara deklarasi ini cukup mengejutkan. Selain karena sehari sebelumnya dia menghilang dari rumah dinas saat KPK melakukan pengeledahan, Gus Muhdlor merupakan Bupati Sidoarjo yang didukung PKB di Pilbup Sidoarjo 2020. Seperti diketahui bahwa PKB merupakan salah satu partai utama dalam koalisi partai pengusung paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Menurutnya, ada puluhan kiai dan ulama lain yang turut menghadiri acara selawatan dan deklarasi tersebut. Termasuk jurkam tim kampanye nasional (TKN) Khofifah Indar Parawansa. "Banyak juga para kiai dan alim ulama yang turut hadir. Bu Khofifah juga akan mendampingi pak Prabowo," ungkapinya. Gus Aria menambahkan deklarasi itu ada wujud dukungan keluarga besar Bumi Sholawat dalam memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran di Sidoarjo.

Berita 2: "Gus Muhdlor: Nderek Kiai, Milihnya Prabowo"

Gus Muhdlor: Nderek Kiai, Milihnya Prabowo

Reporter: **Mohamad Nur Khotib** |

Editor: **Taufiqur Rahman** |

Kamis 01-02-2024, 17:43 WIB



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan ratusan santri PP Bumi Sholawat, Tulangan Sidoarjo siap menangkan pasangan Prabowo-Gibran -Boy Slamet/Harian
Disway

SIDOARJO, HARIAN DISWAY- Bupati SIDOARJO Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Ali hadir di acara Deklarasi Santri Nderek Kiai di Kompleks Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat, Desa Lebo, SIDOARJO, Kamis, 1 Februari 2023.

Gus Ali mengajak ribuan massa untuk ikut memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan optimistis menang satu putaran dalam Pilpres 2024. “Saya nggak panjang-panjang, ingin sampaikan dua hal sekaligus. Hanya dua hal,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu di panggung disambut riuh. Pertama, kata Gus Muhdlor, diakui atau tidak, hari ini Sidoarjo sudah di rel pembangunan sangat baik. Begitu pula Indonesia dan Jawa Timur.

Maka menurutnya, isu kontinuitas pembangunan menjadi penting. “Kalau Pak Jokowi sudah berhasil, maka otomatis harus dilanjutkan, yang bisa dan yang merepresentasikan Pak Jokowi hari ini adalah Pak Prabowo,” jelasnya disambut riuh hadirin. Kedua, lanjut Gus Muhdlor, ia berpesan agar sepulang dari acara deklarasi, sudah punya alasan untuk memilih Prabowo-Gibran. “*Lek ditakoni lapo wong* Sidoarjo kudu pilih Prabowo, jawabane siji, *nderek* kiai milih Pak Prabowo,” teriaknya lantang dan berulang. Gus Muhdlor meyakinkan kepada massa bahwa dirinya juga memilih Prabowo-Gibran. “*Ojo ditakok maneh*, Pak bupati milih e Pak Prabowo. Nderek kiai milihne Prabsowo. Tangane iku diangkat, dua jari. Menang satu putaran!” tandasnya.(*)

3.1 Legitimasi Kekuasaan Melalui Tradisi dan Agama

Kedua berita tersebut mengangkat sudut pandang yang sama sebagai judul, yakni frasa */nderek kiai/* yang diucapkan secara langsung oleh Gus Muhdlor, Bupati Sidoarjo, dalam deklarasi dukungan untuk Prabowo-Gibran. Jika ditelaah lebih jauh, frasa itu berasal dari Bahasa Jawa yang artinya ‘mengikuti kiai atau figur ulama dalam bidang agama’. Asal usul frasa itu sebenarnya merupakan bahasa arab *sami’na wa atha’na* yang artinya ‘kami dengar, dan kami taat’. Frasa tersebut umum digunakan dalam lingkup pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam seperti pesantren. Berawal dari wujud kepatuhan santri terhadap sang kiai, frasa itu berkembang menjadi tradisi yang terus dijalankan dan bahkan sudah menjadi prinsip yang dianut oleh seorang santri. Bagi santri yang hidup di lingkungan pesantren, *nderek* kiai merupakan prinsip yang dijaga serta diterapkan dalam rangka menjaga ketersinambungan dengan kiainya dengan menjalankan *dawuh*, nasihat, bahkan perintah dari kiai (Mafrukhin, 2020). Oleh sebab itu, penggunaan frasa */nderek kiai/* tidaklah dapat dilepaskan dari konteks tempat frasa muncul dan dipelihara yakni kultur pesantren yang menempatkan kiai sebagai pemegang otoritas tertinggi di lingkungan pesantren (Akbari & Savirani, 2020). Figur kiai lebih dari sekadar guru, tetapi juga wali yang berarti ‘pengganti orang tua’ mengingat peran kiai yang cukup luas, yakni tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk kepribadian santri dalam bermasyarakat.

Dengan peran yang begitu krusial, kiai tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk kepribadian santri. Figur kiai memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk sikap dan pandangan politik santri dan didukung dengan adanya frasa

/nderek kiai/ yang sudah menjadi prinsip di kalangan mereka. Frasa yang pada awalnya hanya digunakan dalam lingkup pendidikan akan mengimplikasikan hal yang berbeda apabila disampaikan dalam sebuah deklarasi untuk menyatakan dukungan pada pihak tertentu. Dapat dikatakan penggunaan frasa tersebut memiliki tujuan serta tendensi untuk membentuk serta memengaruhi sikap politik santri yang hadir pada acara tersebut. Mengacu pada pendapat Eagleton (1991) mengenai definisi ideologi yang merupakan sistem ide, nilai, keyakinan, pemanfaatan frasa */Nderek kiai/* untuk mengerahkan dukungan massa, dalam hal ini santri, sudah mencukupi definisi ideologi sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Frasa */nderek kiai/* ('mengikuti ulama') mencerminkan penggunaan tradisi dan otoritas agama untuk melegitimasi dukungan politik. Dalam perspektif Eagleton, itu adalah contoh bagaimana ideologi bekerja untuk melegitimasi kekuasaan. Ulama, sebagai otoritas agama yang dihormati, digunakan sebagai figur sentral untuk memperkuat dan memberikan kredibilitas pada pilihan politik tertentu. Hal itu memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik berusaha untuk tampak "alamiah" dan "benar" dengan mengaitkannya pada nilai-nilai tradisional dan keagamaan yang sudah mapan dalam masyarakat.

3.2 Reproduksi Ideologi dalam Struktur Sosial

Kehadiran pesantren, sebagai lembaga pendidikan agama Islam, memiliki peran yang kompleks dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan tentu juga besar kontribusinya dalam politik Indonesia, khususnya Jawa Timur (Fiqih, 2022). Jika meninjau isi kedua berita tersebut yang menjelaskan lokasi dilaksanakannya deklarasi dukungan pada pasangan Prabowo Gibran adalah Pondok Pesantren Bumi Sholawat yang berlokasi di Tulangan, Sidoarjo, dengan dihadiri santri pesantren tersebut dan juga masyarakat umum, pernyataan dukungan yang disampaikan di hadapan santri pondok pesantren tersebut menunjukkan bagaimana ideologi direproduksi dalam struktur sosial, khususnya dalam lembaga pendidikan agama. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjadi tempat reproduksi ideologi tertentu yang mendukung struktur kekuasaan yang ada. Itu sejalan dengan pandangan Eagleton bahwa ideologi tidak hanya ada dalam pikiran individu, tetapi juga dalam praktik dan institusi sosial. Hal itu masih erat kaitannya dengan pengaruh dari figur kiai dalam lingkungan pesantren sebagaimana diungkapkan Greg Fealy bahwa lingkungan pesantren, baik berupa komunitas yang berada dalam lingkungan tersebut atau sekadar mengamalkan budaya atau kultur pesantren, menganggap otoritas kiai bersifat absolut sehingga mematuhi perintah kiai adalah sebuah keharusan dalam kultur pesantren (Fealy, 2012).

3.3 Interpelasi Ideologis

Konsep interpelasi adalah pemikiran Louis Althusser yang diadopsi oleh Eagleton (1991) karena keterkaitan dengan pemikirannya terkait ideologi. Konsep interpelasi digunakan dengan tujuan untuk memahami bagaimana para santri dan masyarakat umum secara luas diinterpelasi atau diarahkan ke dalam posisi subjek ideologis melalui apa yang disampaikan Gus Mudhlor dalam deklarasi tersebut. Dengan menggunakan */nderek kiai/*, Gus Mudhlor menginterpelasi para santri sebagai subjek yang patuh dan loyal kepada otoritas agama. Itu menunjukkan

bagaimana ideologi beroperasi dalam kehidupan sehari-hari yang membuat individu secara tidak sadar menyetujui dan mendukung struktur kekuasaan yang ada.

3.4 Hegemoni

Dalam mengekspresikan pemikirannya tentang ideologi, Eagleton (1991) kerap menyoroti konsep hegemoni dari Antonio Gramsci bahwa kekuasaan tidak hanya dipaksakan melalui dominasi langsung, tetapi juga melalui persetujuan dan kepemimpinan intelektual dan moral. Dalam kasus itu, dukungan kepada pasangan 02 yang didasarkan pada "*nderek kiai*" mencerminkan upaya untuk membangun hegemoni dengan memperoleh persetujuan dari masyarakat melalui pemanfaatan otoritas keagamaan. Itu adalah bentuk hegemoni yang menyatakan bahwa dukungan politik dibangun bukan hanya melalui kekuatan atau paksaan, tetapi melalui persetujuan yang diperoleh dari otoritas yang dihormati. Dalam deklarasi yang disampaikan Gus Mudhlor selaku Bupati Sidoarjo, upaya pemanfaatan otoritas demi memperoleh persetujuan serta dukungan masyarakat tidak hanya memanfaatkan otoritas keagamaan, tetapi juga otoritas yang sedang berkuasa seperti Presiden serta dirinya sendiri sebagai pemegang otoritas tertinggi di Sidoarjo. Hal itu tecermin secara eksplisit dalam kedua berita tersebut, Gus Mudhlor menyampaikan, "Yang bisa dan merepresentasikan Pak Jokowi hari ini adalah Pak Prabowo" dan "*Ojo ditakok maneh, Pak Bupati milih Pak Prabowo*". Kalimat tersebut jelas menunjukkan pencatutan figur yang memiliki otoritas atau figur berkuasa untuk melegitimasi serta mengarahkan persetujuan masyarakat untuk mendukung satu kandidat tertentu sebagaimana konsep hegemoni yang dikemukakan Gramsci serta diamini oleh Eagleton.

4. Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa frasa */nderek kyai/* digunakan sebagai wacana untuk melegitimasi kekuasaan dan menginterpelasi santri guna mendukung pasangan calon politik 02 dalam pemilu 2024. Melalui analisis wacana kritis dan teori ideologi Terry Eagleton, ditemukan bahwa frasa */nderek kyai/* tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga tujuan ideologis yang signifikan. Frasa */nderek kyai/* membangun legitimasi politik dengan mengaitkan dukungan politik dengan otoritas religius kiai dan menciptakan narasi kuat yang beresonansi dengan komunitas santri. Penggunaan wacana tersebut berhasil membuat santri merasa sebagai bagian dari gerakan politik tertentu sehingga mendorong mereka memberikan dukungan untuk pasangan calon yang dipromosikan oleh figur otoritatif dalam lingkungan pesantren. Hasil penelitian ini menunjukkan peran strategis wacana religius dalam dinamika politik elektoral di Indonesia. Masyarakat, terutama santri, perlu mendapatkan pendidikan politik yang lebih baik untuk memahami bagaimana wacana dan simbol-simbol religius digunakan dalam politik agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan kritis. Selain itu, media massa harus lebih kritis dan independen dalam melaporkan penggunaan wacana religius dalam politik. Investigasi yang mendalam dan analisis yang kritis dapat membantu masyarakat memahami motif dan implikasi di balik penggunaan wacana tersebut. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi penggunaan wacana religius di daerah lain dan dalam konteks politik yang berbeda mengingat limitasi penelitian ini terletak pada konteks geografis, yakni Kabupaten Sidoarjo. Studi komparatif bisa memberikan wawasan lebih luas tentang dinamika antara agama dan politik di

Indonesia. Akademisi dan praktisi politik perlu bekerja sama untuk mengembangkan strategi yang dapat mengurangi manipulasi wacana religius dalam politik sambil tetap menghargai peran agama dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami interaksi kompleks antara agama dan politik serta menawarkan langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afdholy, N., Setya Yuwana Sudikan, & Indarti, T. (2022). *Revealing the ideology of Omicron discourse in CNN Indonesia news*. <https://doi.org/10.18413/2313-8912-2022-8-2-0-6>
- Akbari, R. H., & Savirani, A. (2020). *Urip Mati Nderek Kyai: Kajian Voting Behavior Santri Institusi Pendidikan Islam SMA Syubbanul Wathon Magelang dalam Pemilu Presiden 2019* [Gadjah Mada University]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/192915>
- Annur, C. M. (2023). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!* Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. ISEAS.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Eagleton, T. (1991). *Ideology: An Introduction*. Verso.
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Routledge.
- Fealy, G. (2012). *Ijtihad Politik Ulama ; Sejarah NU 1952-1967* (Vol. 1). LKiS.
- Fealy, G., & White, S. (2008). *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Fiqih, M. A. (2022). *Peran Pesantren dalam Menjaga Tradisi-Budaya dan Moral Bangsa*. 4.
- Mafrukhin, U. (2020, June 17). Santri dan Tradisi “Nderek Dawuh Kiai.” *LP Maarif NU*. <https://maarifnajateng.or.id/2020/06/santri-dan-tradisi-nderek-dawuh-kiai/>
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2018). *Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats*. Cambridge University Press.
- Ni'mah, Z. A., & Rifa'i, A. (2022). History Of Indonesia's Islamic Educational Institutions In A Political Framework. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 1(1), 31–41.
- Pepinsky, T. B., Liddle, R. W., & Mujani, S. (2012). Testing Islam's Political Advantage: Evidence from Indonesia. *American Journal of Political Science*, 56(3), 584–600.

- Pinterpolitik. (2023). *Pilpres 2024 adalah Pertarungan Jawa Timur?*
<https://www.pinterpolitik.com/in-depth/pilpres-2024-adalah-pertarungan-jawa-timur/>
- Pratama, P. Y., Habibi, M. B., & Ningtias, R. K. (2024). Dynamics of the Islamic Political Movement The Influence of Pesantren's Islamic Community in East Java in the 2024 Elections. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 3(1), 84–99.
<https://doi.org/10.59001/pjrs.v3i1.145>
- Ufen, A. (2018). From Aliran to Dealignment: Political Parties in Post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 16(1).
<https://doi.org/10.5367/000000008784108149>